

B. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN**1. URUSAN PENDIDIKAN**

Urusan Pendidikan dilakukan oleh Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga, Dinas Arsip & Perpustakaan dan Kecamatan Wonosobo

a. Alokasi Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 telah mengalokasikan dana sebesar **Rp 649.783.474.302,-** atau **32,48%** dari alokasi APBD Tahun 2017 yang berjumlah **Rp 2.000.613.704.761,-**. Alokasi sebesar **Rp 649.783.474.302,-** dapat terealisasi sebesar **Rp 582.305.199.493,-** atau **89,62%**. Adapun Program dan alokasi anggaran urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.B.1.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2017

Program	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA	649.783.474.302	582.305.199.493	89,62
BELANJA LANGSUNG	143.943.254.225	130.661.458.777	90,77
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.473.984.000	1.453.840.532	98,63
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	645.926.000	635.955.749	98,46
Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.060.000.000	4.007.714.919	98,71
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	46.041.560.500	37.064.238.971	80,50
Program Pendidikan Non Formal	430.000.000	421.708.000	98,07
Program Pendidikan Luar Biasa	100.000.000	96.000.000	96,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.844.250.000	7.763.725.000	98,97
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	465.000.000	458.664.138	98,64
Program Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan	375.000.000	352.485.000	94,00
Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS)	81.257.533.725	77.178.558.713	94,98
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.250.000.000	1.250.000.000	98,24
BELANJA TIDAK LANGSUNG	505.840.220.077	451.643.740.716	89,29

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo, 2017 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyelenggaraan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas dan pelayanan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diampu. Anggaran untuk program ini dimanfaatkan untuk kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor, pengadaan meubelair, pengadaan almari file dan AC, pengadaan sarana penunjang pelaksanaan pekerjaan seperti komputer, scanner, printer, LCD, hardisk eksternal, Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor dan Penataan Lingkungan Kantor.

3) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan PAUD melalui lembaga PAUD, Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, serta, berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat, dan jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Anggaran Program bersumber dari APBD Kabupaten dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang disalurkan melalui APBD Kabupaten. Sebanyak 5 lembaga PAUD mendapatkan bantuan peningkatan prasarana pendidikan seperti pembangunan Gedung PAUD, Rehabilitasi PAUD, serta Pagar dan Paving PAUD. Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, telah dilaksanakan Pagar dan Paving PAUD Tunas Harapan Desa Pacarmulyo Leksono dan Penyempurnaan PAUD Sedah Ayu Selokromo. Pada kelompok TK, Rehab Gedung TK Pertiwi Desa Siwuran Garung, Rehab dan penyempurnaan Ruang TK ABA Beran Kec. Kepil, Gedung TK Pertiwi Kel. Kertek Kec. Kertek, Pagar Keliling dan Pavingisasi TK Pertiwi RT.01/01 Surojoyo, Kec. Sapuran, Pagar Keliling dan Paving TK Harapan Desa Kauman Kec. Kaliwiro, Paving dan Senderan TK Pertiwi Larangan Kulon Kec. Mojotengah, RKB TK ABA V Pancarwening Wonosobo Kec. Wonosobo, Ruang Kelas Baru dan Senderan TK ABA Kel. Garung, Kec. Garung, TK Pertiwi Sindupaten, Kec. Kertek dan TK pertiwi Desa Banjar Kec. Kertek. Secara berjenjang diselenggarakan acara Gebyar PAUD sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan, menggugah serta meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap pentingnya PAUD. Bentuk kegiatan adalah

festival keterampilan bermain peserta didik pada program Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak(TK). Untuk meningkatkan kualitas dan motivasi pendidik diselenggarakan Apresiasi Gugus PAUD , Ajang Kreatifitas Anak Usia Dini dan Apresiasi GTK PAUD Dikmas yang sub kegiatannya adalah Lomba-lomba untuk peserta didik PAUD, Lomba Gugus PAUD, dan Seleksi PTK PAUD Dikmas.

4) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi sekolah dasar dan SLTP, peningkatan mutu pembelajaran serta fasilitasi kejuaraan dalam rangka meningkatkan prestasi siswa serta pendidik. Untuk tingkat SD kegiatan Pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran sekolah dasar negeri dilaksanakan untuk pengadaan alat marchingband bantuan alat praktek jurusan TSM SMK Al- Madani Ma'arif Kepil, pengadaan alat peraga pendidikan, alat kesenian dan pengadaan meubelair MI yang antara lain diterima oleh MI Muhamadiyah Bener Kepil. Sedangkan pembangunan senderan /pagar keliling di SMP Rifaiyah Sapuran . Ada 2 Sekolah Menengah Kejuruan yang mendapatkan bantuan berupa pengadaan komputer dan alat praktek jurusan .

Selanjutnya melalui anggaran bantuan provinsi, telah dilaksanakan pembangunan ruang perpustakaan SD di 15 sekolah, pengadaan meubelair perpustakaan SD di 1 sekolah, bantuan pengadaan buku perpustakaan SD di 377 sekolah, Pengadaan meubelair pengganti SD sejumlah 25 sekolah dengan anggaran Rp. 500.000.000.00 yang tersebar di wilayah Kabupaten Wonosobo. Pada tingkat SMP, telah dialokasikan kegiatan pengadaan buku perpustakaan bagi 72 SMP dan 61 SMP yang mendapatkan bantuan pengadaan buku mulok Bahasa Jawa. Selain itu Berkenaan dengan adanya lomba tingkat provinsi pada tahun 2017 diselenggarakan kegiatan pembinaan bakat, minat dan prestasi siswa SD dan SMP.

Anggaran bantuan provinsi juga dialokasikan pada upaya peningkatan mutu pembelajaran yang dilaksanakan melalui Pengadaan Buku Perpustakaan SD bagi 377 SD, Pengadaan Meubelair pengganti SD, Pengadaan Buku Perpustakaan SMP, pengadaan alat TIK bagi 27 SD.

Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan pada tahun 2017 dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Prasarana Pendidikan dan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD dan SMP.

5) Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Non Formal bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan usia 15 tahun ke atas dengan berbasis pemberdayaan, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Selain itu layanan PNF ditujukan untuk Pembinaan Kepada Lembaga PNF dan Stimulasi Kegiatan Forum PNF. Beberapa kegiatan yang didanai dalam program ini antara lain Penguatan Lembaga PNF, Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kejar Paket A, Paket B Dan C bagi PKBM, dan Perencanaan T-1 Pembangunan RKB, Rehabilitasi ruang kelas dan jamban SKB Wonosobo.

6) Program Pendidikan Luar Biasa

Program Pendidikan Luar Biasa bertujuan untuk meningkatkan Layanan kepada anak berkebutuhan khusus. Keberadaan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Wonosobo juga menjadi perhatian melalui fasilitasi Sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah yang menggabungkan layanan pendidikan khusus dan regular dalam satu sistem persekolahan, dimana siswa berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan potensinya masing-masing dan siswa regular mendapatkan layanan khusus untuk mengembangkan potensi mereka sehingga baik siswa yang berkebutuhan khusus ataupun siswa regular dapat bersama-sama mengembangkan potensi masing-masing dan mampu hidup eksis dan harmonis dalam masyarakat.

Meskipun beberapa sekolah telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi, ada beberapa siswa berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan sekolah formal diluar sekolah yang ditunjuk karena alasan keterjangkauan. Untuk itu pada tahun 2017 dilaksanakan Pelatihan Penanganan ABK pada sekolah Inklusi yang memiliki siswa berkebutuhan khusus dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan bagi guru dalam menstimulasi siswa berkebutuhan khusus.

Harapannya dengan menamnah jumlah guru terlatih semakin banyak sekolah yang bisa menerima anak- anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah formal. Sekolah yang telah mengikuti pelatihan juga didorong untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang akses sekolah bagi anak berkebutuhan khusus sehingga tidak ada lagi anak- anak yang tidak bersekolah.

7) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik maupun kependidikan yang setiap tahun diadakan pemilihan guru berprestasi dan pengawas berdedikasi secara berjenjang mulai tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP SMA/SMK dilakukan dengan penyelenggaraan Bintek Map Zipper bagi Guru PAUD, SD, SMP. Sebagai ilustrasi untuk jenjang PAUD, pelatihan dikonsentrasikan pada pengembangan kurikulum dan manajemen pengelolaan PAUD, dimana masih cukup banyak lembaga PAUD yang pengelolannya belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk jenjang SMA/SMK focus pelatihan terbagi pada manajemen sekolah, penelitian tindakan kelas dalam rangka merespon system penilaian kinerja guru, pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan laboratorium. Beberapa kegiatan yang didanai dalam program ini antara lain Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik, Fasilitasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Non PNS Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik (PAUD, SD, Dan SMP), Pengembangan Sistem Pendataan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Seleksi Kepala Sekolah, Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Formal dan Seleksi Calon Pengawas Sekolah.

Sedangkan prestasi yang diraih guru terbaik kabupaten wonosobo antara lain: pada jenjang SD Yunina Resmi P, M. Pd memperoleh juara III Olimpiade Guru Nasional dan pada jenjang SMP Juara III Olimpiade Guru Nasional diperoleh Joko Trisilo , S. Pd.

8) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dan meningkatkan manajemen pendidikan. Dengan Kegiatan Optimalisasi Manajemen Informasi dan Pendataan Pendidikan dapat tersedianya data siswa penerima Program Indonesia Pintar, terbitnya Ijin Operasional Pendirian Sekolah, tersedianya Data Pokok Pendidikan Tahun 2017, tersedianya Profil Pendidikan Tahun 2017, tersedianya Data Sekolah Tahun 2017. Sistem Dapodik dirancang menggunakan basis open source dengan menerapkan sistem database terpusat dan aplikasi berbasis web. Dengan sistem tersebut maka pengelolaan riwayat data sekolah, siswa, guru/karyawan lebih mudah diintegrasikan dan disimpan secara terpusat dan dapat diakses dengan lebih mudah dan terbuka oleh masyarakat dalam batasan tertentu melalui internet. Selain itu proses pemutakhiran data dapat dilakukan secara langsung online dan real time oleh setiap Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi, kota atau kabupaten di seluruh Indonesia memanfaatkan koneksi internet. Guna memwadah dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program Pendidikan di kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan fasilitasi dewan Pendidikan melalui diskusi forum Pendidikan, kajian public tentang Pendidikan, dan sosialisasi seleksi dewan Pendidikan.

Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang pendidikan karakter pada satuan Pendidikan dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Karakter yang berupa Sosialisasi tentang pendidikan karakter pada satuan pendidikan.

9) Program Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan mutu Pendidikan. Dengan Kegiatan Pembinaan Akreditasi PAUD Dan PNF dapat terselenggaranya Sosialisasi Akreditasi PNF. Guna meningkatkan prestasi Siswa di jenjang provinsi, nasional dan internasional dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Kompetisi Siswa Tingkat Provinsi Dan Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kesenian, Dan Olahraga yang berupa Penghargaan bagi siswa berprestasi tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional pada kategori akademik dan non akademik. Disamping itu dengan Survey Analisa Kerusakan SMP dapat tersedianya data yang akurat guna mendukung SPM Pendidikan.

Beberapa prestasi yang telah diraih putra putri terbaik Kabupaten Wonosobo antara lain : pada tingkat nasional Roberto Eugenio Sugiharto berhasil memperoleh juara 2 olimpiade matematika tingkat nasional , melalui bidang SAINS Wiwin Astuti memperoleh juara 1 Lomba Inovasi Pelajar Nasional ke 5 dan Raden Joda memperoleh juara umum Lomba Inovasi Pelajar Nasional ke 5. Pada Tingkat Provinsi Chesya Paulina memperoleh juara I Olimpiade IPS.

10) Program Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS)

Program penyediaan belanja operasional sekolah bertujuan untuk penyediaan dana biaya operasi non personalia bagi satuan Pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Penyaluran BOS dari pemerintah pusat melalui mekanisme transfer langsung ke rekening sekolah, dan dilakukan pencatatan pada rekening daerah khusus untuk sekolah SD/ SMP Negeri penerima BOS, sedangkan dari anggaran APBD Kabupaten Kegiatan Fasilitas Manajemen BOS guna mendukung akuntabilitas penyediaan BOS pada bantuan pendidikan.

11) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan minat budaya baca masyarakat, birokrasi dan meningkatkan kesadaran semua elemen masyarakat dalam membangun generasi muda. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan. Karena minimnya jumlah perpustakaan desa/kelurahan dan sekolah yang terkelola dengan baik sesuai standar layanan perpustakaan desa/kelurahan dan sekolah pada tahun 2017 pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk kegiatan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Sekolah serta Pembinaan Perpustakaan Desa (DBHCHT). Pembinaan Perpustakaan desa dilaksanakan oleh 14 rintisan perpustades tahun 2017 yang tersebar di 14 kecamatan.

c. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Uraian capaian kinerja urusan pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.B.1.2
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017
Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No.	Indikator Kinerja Kunci EKPPD	Capaian Kinerja		
		2015	2016	2017
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	66,05	68,51	72,18
2	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,87%	98,91	98,31
3	Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A	94,23	95,49	98,18
4	Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/Paket B	75,71	81,03	76,55
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MAN/Paket C	34,47	40,22	24,93
6	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,08	0,18	0,05
7	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,27	0,65	0,55
8	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	1,39	1,39	1,03
9	Angka Kelulusan(AL)SD/MI	99,23	100	99,9
10	Angka Kelulusan(AL)SMP/MTs	100	99,84	99,94

III.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Kunci EKPPD	Capaian Kinerja		
		2015	2016	2017
11	Angka Kelulusan(AL)SMA/SMK/MA	96,98	99,87	99,96
12	Angka Melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs	93,22	91,97	93,61
13	Angka Melanjutkan (AM)dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	74,1	70,73	76,55
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	68,44	89,58	91,94
15	Indikator tambahan: Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,11	6,11* (2015)	6,12

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2017

Tabel III.B.1.3
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
URUSAN PENDIDIKAN						
1	APM SD	95,49	96	98,18	102,27	○
2	APK SD	107,38	103,84	109,68	105,62	○
3	APM SMP	81,03	78,24	76,55	97,84	→
4	APK SMP	96,31	100,24	99,24	99,00	→
5	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun	97,2	87,12	93,05	106,81	○
6	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun	97,23	96,35	99,50	103,27	○
7	Angka Putus Sekolah SD	0,18	0,072	0,05	69,44	↓
8	Angka Putus Sekolah SMP	0,65	0,23	0,55	239,13	○
9	Rasio APK SMP penduduk usia sekolah 20% penduduk termiskin dibanding 20% terkaya	0,81	0,65	0,86	132,31	○
10	Angka Kelulusan (AL) SD	100	99,38	99,9	100,52	○
11	Angka Kelulusan (AL) SMP	99,84	100	99,94	99,94	→
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	91,97	94,57	93,61	98,98	→
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	70,73	76,67	76,55	99,84	→
14	Persentase ruang kelas SD yang memenuhi	70%	70%	75%	107,14	○

III.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
	standar nasional Pendidikan					
15	Persentase ruang kelas SMP yang memenuhi standar nasional Pendidikan	78%	78%	80%	102,56	○
16	Persentase indeks nilai sikap siswa kategori baik	80%	77%	98,18%	127,51	○
17	% PAUD formal yang terakreditasi	20%	20%	60%	300,00	○
18	APK PAUD	39	39,85	59,03	148,13	○
19	Persentase SMK minimal berakreditasi B	55%	58%	DTT		
20	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	10	15,40%	20%	129,87	○
21	Angka Melek Huruf Penduduk 15 -45 Tahun	98,9	98,64	98,31	99,67	→
22	Persentase pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	87,18	79,29	89,87	113,34	○
23	Persentase pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	91,46	95,26	93,59	98,25	→
24	Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4	47%	50%	48%	96,00	→
25	persentase SD berakreditasi B	83%	85%	95,85%	112,76	○
26	Persentase SMP Minimal Berakreditasi B	80%	81%	75,49%	93,20	→
27	Persentase SMA minimal berakreditasi B	82,00%	81,72%	87,50%	107,07	○
28	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD	7,18	7,25	7,37	101,66	○
29	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SMP	6,38	6,4	5,6	87,50	↓
30	Rata - rata nilai ujian sekolah SMA	6,2	6,25	5,1	81,60	↓
31	Persentase sekolah SD yang menerapkan sistem inklusi	0,85%	1,10%	1,24%	112,73	○
32	Persentase sekolah SMP yang menerapkan sistem inklusi	1,43%	2,00%	2,77%	138,50	○
33	Persentase Sekolah yang website memiliki aktif	50%	40%	55%	137,50	○

III.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
34	Rasio Guru / Murid SD (jumlah guru PNS SD per 1000 murid SD)	42,87	41,29	42,71	103,44	○
35	Rasio Guru / Murid SMP (jumlah guru PNS SMP per 1000 murid SMP)	35	35	40,57	115,91	○
36	Rasio Guru/ Murid SMA (jumlah guru PNS SMA per 1000 murid SMA)	40	39	32,3	82,82	↓
37	Persentase Sekolah Ramah Anak	1,06	0,002	5,55	277500	○
38	Persentase kompetensi keahlian SMK minimal berakreditasi B	60%	58%	DTT		
39	Persentase ruang kelas SMA yang memenuhi standar nasional Pendidikan	88%	88%	DTT		
40	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun	57,15	43,93	50,08	114,00	○
41	Persentase indeks nilai sikap siswa SMA kategori baik	76%	77%	DTT		
42	Rasio APK SMA penduduk usia sekolah 20% penduduk termiskin dibanding 20% terkaya	1%	65,00%	42,65%	65,62	↓

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2017

Keterangan Status Capaian:

- Tercapai Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
- Tidak tercapai Realisasi capaian 90%- 99%
- ↓ Tidak tercapai dan perlu upaya keras Realisasi capaian $\leq 90\%$

Secara umum capaian kinerja urusan pendidikan terdapat peningkatan. Angka Partisipasi Kasar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada kategori TK/RA mengalami kenaikan yang signifikan. Pendidikan PAUD yang oleh sebagian masyarakat masih diabaikan mulai dirasakan manfaatnya untuk menghadapi persiapan ke jenjang sekolah dasar, sehingga secara bertahap APK PAUD meningkat. Meningkatnya animo masyarakat untuk mengikutsertakan anak-anaknya dalam pendidikan PAUD ini sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini diantaranya melalui peningkatan sarana dan prasarana PAUD baik negeri maupun swasta, bantuan alat permainan edukatif serta

III.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

penyelenggaraan kegiatan kreativitas bagi peserta didik PAUD maupun apresiasi bagi bunda PAUD.

Capaian Angka Partisipasi Murni atau APM pada jenjang pendidikan dasar mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada jenjang SD APM meningkat dari 95,49 menjadi 98,18 pada tahun 2017 dan pada jenjang SMP/MTs APM menurun 4,48 % dari tahun sebelumnya menjadi 76,55. Ini disebabkan karena masih ada siswa yg usianya 12 dan 16 yg masih sekolah di SMP. Angka Partisipasi sekolah yang menunjukkan jumlah anak usia sekolah 7-12 yang sedang mengenyam pendidikan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 angka putus sekolah usia SD adalah sebesar 0,07 dan menurun menjadi 0,05 pada tahun 2017, sedangkan untuk usia SMP angka putus sekolah sebesar 0,55 meningkat dibandingkan tahun 2016. Dukungan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten untuk urusan pendidikan terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas pada tahun 2017 di Kabupaten Wonosobo masih rendah yaitu 6,12 tahun yang artinya sebagian besar penduduk di usia 25 tahun ke atas hanya menikmati pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP. Perlu upaya keras dan kerjasama berbagai pihak untuk dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah karena bukan merupakan hal yang mudah dan instan. Dari sisi penyediaan sarana sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang dapat terjangkau bagi masyarakat baik formal maupun non formal serta motivasi dan kemauan yang tinggi dari orang tua dan peserta didik untuk secara sadar untuk menruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel III.B.1.4

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Pendidikan dan Olahraga

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	338
	b. S-1	3222
	c. DI-DIV	379
	d. SMA	397
	e. SMP	67
	f. SD	10
	Jumlah	4413
2	Golongan	
	a. Golongan IV	2041
	b. Golongan III	2078
	c. Golongan II	254
	d. Golongan I	40

III.B.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

No	Indikator	Jumlah
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	4413
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	-
	b. Esselon III	3
	c. Esselon IV	19
	Staf/Fungsional Umum	4391
	Jumlah	4413

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, 2017

e. Permasalahan dan Solusi

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pendidikan antara lain:

Tabel III.B.1.5
Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan

Permasalahan	Solusi
1. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah usia 17-45 tahun keatas	Melaksanakan kegiatan kejar paket bekerjasama dengan perangkat daerah dan lembaga pendidikan masyarakat.
2. Rendahnya motivasi siswa dan masyarakat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi	• Melakukan upaya peningkatan motivasi masyarakat melalui pemberian beasiswa • Kolaborasi dengan masyarakat berprestasi di wilayah setempat untuk pemberian motivasi pentingnya pendidikan. • Meningkatkan kerjasama dan berbagi peran antara pemerintah, sekolah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi sekolah.
3. Belum meratanya kualitas dan kompetensi guru	Melakukan pemerataan kompetensi guru melalui pemetaan, penyebaran dan rotasi guru serta peningkatan kompetensi.
4. Masih rendahnya kualitas lembaga pendidikan masyarakat	Mendorong dan memfasilitasi akreditasi lembaga pendidikan masyarakat
5. Masih minimnya sekolah inklusi baik jenjang SD,SMP maupun SMA karena keterbatasan jumlah guru yang terlatih.	Menambah jumlah guru yang terlatih baik di sekolah inklusi maupun di sekolah yang memiliki siswa berkebutuhan khusus melalui pelatihan.

III.B.1.Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan